

PUBLIC RELATION NON KOMERSIAL

‘PUBLIC RELATION PEMERINTAH’

Di sektor non komersial terdapat berbagai jenis organisasi yang berbeda-beda, masing-masing organisasi tersebut akan menentukan permintaan/tuntutan khusus kepada para praktisi. Perbedaan ini diakui oleh para konsultan public relation. Keberanekaragaman yang sangat besar dari organisasi-organisasi non komersial itu tidak diulas seluruhnya pada bagian ini. Karena itu, pada bagian ini perhatian hanya dipusatkan pada public relation pada sektor pemerintahan.

Public relation pemerintah beroperasi di bawah kendala-kendala tertentu, yang umumnya sukar diterapkan dalam dunia komersial. Misalnya, jika perundang-undangan yang baru diusulkan dan rancangan undang-undang diterbitkan, maka tidak ada organ pemerintah yang berani meniupkan isu pemberitaan pers tentang hal tersebut. Sehingga, kegiatan public relation yang berdasarkan sistem undang-undang baru dapat dimulai jika rancangan undang-undang tersebut telah menjadi suatu ketetapan yang telah disetujui oleh pemerintah.

Seorang petugas public relation pemerintah, barangkali akan menghabiskan waktu hanya untuk mempersiapkan *tindakan yang kurang efektif*. Seperti *mempersiapkan rencana-rencana cadangan* yang sedemikian banyak guna menghadapi segala kemungkinan, sementara rancangan undang-undang masih dibahas oleh pemerintah atau parlemen, meskipun, kemudian tidak disetujui oleh parlemen.

Tingkat pengendalian biaya biasanya lebih besar dilakukan pada public relation pemerintah. Sebab setiap kegiatan dibiayai dan ditentukan berdasarkan pertimbangan edektifitas biaya. Perkiraan penggunaan Anggaran Negara dilakukan secara hati-hati, bahkan setelah uang dibelanjakan dapat diperiksa oleh komisi parlemen. Atau, menjadi masalah khusus di Parlemen.

Umumnya para petugas public relation pemerintah merasa atau mengklaim dirinya bahwa dirinya *mempunyai tanggung jawab lebih besar* dibandingkan rekan sekerjanya di dunia komersial. Dan, ini bukan berarti petugas public relation perusahaan kurang bertanggung jawab. Hanya saja mereka memiliki eksekutif-eksekutif puncak di perusahaan yang memegang tanggung jawab tertinggi. Di pemerintah pusat ada departemen-departemen lain dan lembaga-lembaga ekstern yang datang berkonsultasi, seorang menteri mungkin perlu “dihadapi”. Disamping itu, petugas public relation pemerintah akan menghadapi pula masalah-masalah di Parlemen.

Setiap anggota masyarakat, secara teoritis, bebas menentang setiap kegiatan public relation pemerintah;- agar dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, atau

juga guna memperhitungkan penggunaan dana-dana masyarakat. Misalnya, pers, yang selalu waspada terhadap pemborosan dana masyarakat. Apalagi kalau seperti di negara kita saat ini, telah berkembang lembaga-lembaga atau komisi pemantau korupsi yang sewaktu-waktu dapat mengaudit setiap pengalokasian dana pemerintah dan bahkan menyeret para pelaksana yang menyimpang ke meja hijau.

Kondisi birokrasi pemerintah juga seringkali dicermati *memperketat prosedur kendali mutu*. Laporan-laporan harus disusun secara seksama, relevan, dengan struktur dan bahasa yang rapi. Presentasi adalah penting, dimana memungkinkan sesuatu dibahas lebih dulu, sebelum dihadapkan ke Parlemen atau seorang Menteri. Standar-standar dalam dunia komersial perlu juga tinggi, tetapi bila waktu mendesak / sangat sempit,- barangkali yang diperlukan hanya jawaban lisan. Di pemerintahan, biasanya pendapat, usulan ataupun penyanggahan harus ditulis.

Petugas public relation di pemerintah, baik pusat maupun daerah, *memiliki keleluasaan untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah diambil*. Dalam wewenang lokal, petugas bertanggung jawab terhadap atasan sebagai suatu korps, atau sebagai pemimpin kelompok. Mereka dapat pula menolak nerita pers yang berbau “politik”. Ada pembagian yang cukup jelas disini,- ahli politik bertanggung jawab untuk memutuskan apa yang wajib diputuskan, dan petugas public relation mempunyai tanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil yang telah diputuskan.

Peranan petugas public relation pemerintah, atau yang lazim pula disebut pegawai informasi dan hubungan masyarakat,- sedang mengalami perubahan. Dimasa lalu, tekanan diletakkan pada bagaimana membawa pesan ke luar. Maka, sumber pemberitaan untuk pers juga tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Komunikasi relatif cenderung berlangsung satu arah. Para politisi cenderung menganggap dirinya sebagai ahli dalam mendeteksi perubahan-perubahan pendapat umum. Oleh karenanya, mereka seringkali memonopoli pengumpulan “informasi pasar”

Dewasa ini, tekanan diberikan ke arah pemerintah terbuka. Sebagai ganti atau bahkan pengembangan dimensi tugas seorang petugas public relation pemerintah (menyusun naskah-naskah pidato dan menyebarkan berita-berita),- kini mereka dapat memainkan peranan yang lebih kritis, dinamis, dan kreatif;- terutama dalam mencari sarana-sarana untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Seperti dengan cara menyebarkan kuesioner, jajak pendapat, menyampaikan rancangan-rancangan, memamerkan perkembangan-perkembangan terbaru dan meminta komentar dari publik.